

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu bidang penting yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, terutama sebagai penyedia minyak nabati yang dimanfaatkan dalam industri makanan, kosmetik, serta sumber energi terbarukan (Fauzi dkk., 2014). Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimulai sebagai kegiatan bisnis pada tahun 1911 oleh sebuah perusahaan dari Belgia dan terus mengalami pertumbuhan sampai sekarang menjadi salah satu produk ekspor yang paling signifikan (Sipayung, 2023). Hal ini terlihat dari informasi yang disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang melaporkan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia di tahun 2024 mencapai US\$27,76 miliar atau sekitar Rp.440 triliun, yang mengalami lonjakan drastis pada tahun 2025 menjadi 35,87 miliar dolar AS atau sekitar Rp.590 triliun, dengan total volume ekspor mencapai 32,343 ribu ton, tumbuh 9,51% dibandingkan tahun sebelumnya (GAPKI, 2026). Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kontribusi dari subsektor perkebunan pada tahun 2024 mencapai 4,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 33,04% dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menjadikannya sebagai salah satu penyumbang utama dalam sektor tersebut (BPS, 2025). Besarnya industri ini juga didukung oleh luasnya jaringan perusahaan perkebunan, di mana pada tahun 2024 tercatat 2.285 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan 95,4% diantaranya berlokasi di Pulau Sumatra dan Kalimantan (BPS, 2025). Dapat disimpulkan bahwa industri kelapa sawit tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekspor utama, tetapi juga bisa sebagai salah satu tiang penyangga dalam perekonomian Indonesia.

Petani plasma adalah petani kecil yang menjalin kerjasama dengan perusahaan utama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, di mana para petani bertanggung jawab atas penyediaan lahan dan pekerja, sedangkan perusahaan utama menyediakan fasilitas produksi seperti benih dan pupuk serta menjamin pasokan untuk hasil panen petani (Yuliana dkk., 2023). Skema ini diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980-an dan telah menjadi kewajiban hukum

sejak tahun 2007, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 (*Forest Peoples Programme*, 2024). Aturan ini mewajibkan semua perusahaan pemegang izin untuk Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Besar Negara untuk mengembangkan kebun plasma dengan luas sekurang – sekurangnya 20% dari total lahan yang dikonsesikan (Kementrian Pertanian, 2007).

Secara praktis, penerapan tanggung jawab plasma ini masih belum berjalan dengan baik. Menurut data dari Direktorat Jendral Perkebunan, luas area plasma hanya tercatat 617.000 hektare pada akhir 2018, yang jauh di bawah target ideal sebesar 1.701.492 hektare, jika dihitung dari 20% total luas perkebunan kelapa sawit besar diperkirakan mencapai 8,5 juta hektare pada tahun 2020 (Betahita, 2021). Hal ini diperkuat oleh temuan audit yang dilaporkan oleh *Forest People Programme* (2024), yang menunjukkan bahwa hanya 20% dari perusahaan perkebunan di tanah air yang benar – benar memenuhi kewajiban plasma mereka. Ketidaksesuaian dalam implementasi ini menandakan bahwa kendala struktural dan regulatif yang menghalangi maksimalisasi manfaat skema plasma untuk para petani kecil (Betahita, 2021).

Kesejahteraan petani plasma biasanya dinilai melalui cara pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga (Sari dkk., 2024). Menurut Wulandari (2019), pendapatan adalah hasil dari produktivitas yang berperan dalam kesejahteraan keluarga, dan jumlah uang yang diterima oleh suatu komunitas dapat menggambarkan tingkat kesejahteraannya. Rasio pengeluaran non – pangan terhadap keseluruhan pengeluaran rumah tangga sering dijadikan patokan, berdasarkan prinsip bahwa semakin tinggi proporsi pengeluaran non – pangan, semakin tinggi pula kesejahteraan rumah tangga tersebut (Gilarso, 2003, dalam Sari dkk., 2024). Selain mendapatkan pendapatan dari hasil tandan buah segar (TBS), sejumlah petani plasma juga menjalankan usaha lain seperti membuka warung sembako, layanan angkutan, dan warung makan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, ini menunjukkan strategi penyesuaian rumah tangga petani dalam mempertahankan kesetabilan ekonomi keluarga (Sari dkk., 2024).

Industri perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor vital yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional Indonesia, baik dalam

hal penyediaan devisa negara lewat ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) maupun sumber kehidupan bagi masyarakat di daerah pedesaan, terutama di Kalimantan dan Sumatra. Salah satu provinsi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah Kalimantan Barat, dengan Kabupaten Ketapang sebagai salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang cepat dalam beberapa dekade terakhir.

Perusahaan Perkebunan PT. Bumitama Gunajaya Agro adalah salah satu perusahaan yang berperan besar dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, yang merupakan bagian dari group BGA. Perusahaan ini didirikan pada pertengahan tahun 1990 – an (1996 – 1997) dan telah berkembang menjadi salah satu pelaku utama dalam produksi minyak kelapa sawit di Indonesia, dengan lokasi operasi yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Sejak tercatat di Bursa Efek Singapura pada tahun 2012 melalui induk perusahaannya, Bumitama Agri Ltd., perusahaan ini terus memperbesar area kebun yang dikelolanya dengan puluhan ribu hektare tanah, baik yang dikelola secara langsung (kebun inti) maupun yang dikembangkan bersama masyarakat melalui pola kemitraan perkebunan plasma. Di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, PT. Bumitama Gunajaya Agro melalui unit usahanya di Nanga Tayap melalui sektor 8B menjalankan pola kemitraan inti – plasma bersama koperasi – koperasi plasma di sejumlah desa, sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun tidak hanya kebun, tetapi juga masyarakat perkebunan di sekitar wilayah operasinya.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga petani plasma?
2. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesejahteraan terhadap petani plasma?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga petani plasma di Kecamatan Nanga Tayap.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga petani plasma.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bagi penulis dalam aspek kesejahteraan keluarga petani plasma dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan para petani plasma.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memahami tingkat kesejahteraan petani plasma, perusahaan yang dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan petani plasma, dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas petani terhadap perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi kesejahteraan petani plasma dan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.